

**MOTIVASI PARK GEUN-HYE MENERAPKAN KEBIJAKAN TRUST
POLITIC DALAM MENGHADAPI KOREA UTARA
PADA TAHUN 2013-2016**

Oleh : Siska Ayu Anggraini

sis.ayuanggraini@gmail.com

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, MA

Bibliography: 26 books, 16 Journal, 19 Websites, 8 Documents

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is explanatory research which aims to explain why Park Geun-hye applied the Trust Politic policy in dealing with North Korea in 2013-2016. Park Geun-hye was the president who was elected in the South Korean presidential election on December 19, 2012 for the 2013-2018 term of presidency. Known as the first female president in the country, park also has an attractive background as former president Park Chung-hee's daughter. Kim Dae Jung's Sunshine Policy failure and Lee Myung Bak's isolation policy made the South Koreans very vulnerable to the North Korean issue during the election period. From here, Park Geun-hye came up with a policy that was felt as a breath of fresh air and suitable for South Korea towards North Korea, namely Trust Politic policy.

The author uses the perspective of behavioralism, which is supported by Richard Snyder's decision making theory and foreign policy concepts at the level of individual analysis as the main actor in international relations. This research uses qualitative methods and literature studies as sources of information.

The results of this study show the reason of Park Geun-hye implemented the Trust Politic policy towards North Korea in 2013-2016 was influenced by internal and external factors. Internal factors are Park Geun-hye's idealistic and progressive perception of North Korea and the failure of foreign policy towards North Korea before Park's time. While external factors are an escalation of threats from North Korea which is increasingly alarming and support from the international community towards Trust Politic policies.

Keyword: Park Geun-hye, Trust Politic, Foreign Policy, North Korea

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi eksplanatif yang berusaha menjelaskan motivasi Park Geun-hye yang menerapkan kebijakan *Trust Politic* dalam menghadapi Korea Utara pada tahun 2013-2016. Pengambilan judul dalam penelitian ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap sosok Park Geun-hye, yang meskipun tidak masuk kedalam parlemen secara tiba-tiba, namun kenyataan bahwa dia terpilih sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2012 membuat banyak pihak tercengang. Selain latar belakang kehidupan dan perjalanan karir politik Park Geun-hye, kebijakannya terhadap Korea Utara yang di gaungkannya sejak masa kampanye adalah salah satu yang paling menarik. Park Geun-hye hadir dengan kebijakan yang dirasa sebagai angin segar dan cocok bagi Korea Selatan terhadap Korea Utara yakni kebijakan *Trust Politic*.

Park Geun-hye adalah presiden yang terpilih pada pemilihan umum presiden Korea Selatan 19 Desember 2012 untuk masa jabatan 2013-2018. Di masa pemilihan tahun 2012, suara elektoral melejit hingga 78,6% dan menjadi total suara tertinggi dalam 15 tahun terakhir.¹ Park Geun-hye adalah sosok perempuan Korea yang di kenal sebagai anak Park Chung-hee, dia adalah seorang Jenderal Korea Selatan yang menjadi Presiden Korea Selatan ke-3 selama 16 tahun sejak 1963-1979. Sebagai anak seorang presiden, nama

¹ Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Parliament. 2014 *In Dept Analysis In The Republic of Korea Park Geun-hyes Presidency Records a Strong Start, Despite Domestic Hurdles* (Brussels: European Parlemtent, 2014), 8.

Park Geun-hye mulai dikenal publik Korea Selatan ketika dia menjabat sebagai *First Lady* pada tahun 1974-1979 menggantikan ibunya Yook Young-soo yang dibunuh pada kudeta militer 1974. Tak lama setelah itu, 5 tahun kemudian pada 1979, ayahnya, Park Chung-hee juga dibunuh dalam sebuah kudeta..²

Sejak akhir Perang Dunia II dan pembagian Semenanjung Korea, Korea Selatan dan Korea Utara telah memasuki fase konfrontasi yang alot. Bagaimanapun, permusuhan, tetap menjadi bagian mendasar atau karakteristik yang melekat pada hubungan antara dua negara Korea, yang akhirnya menempatkan keduanya dalam kondisi persaingan strategis (*Strategic Rivalry*). Hal ini lah yang kemudian menjadikan kebijakan kepala negara Korea Selatan terhadap Korea Utara sangat penting.

Sejak dilantik pada 25 Februari 2013, presiden Park Geun-hye telah mendeklarasikan beberapa fokus permasalahan yang akan tangannya selama 5 tahun menjabat, salah satunya tentunya menciptakan dasar kebijakan untuk mewujudkan unifikasi di Semenanjung Korea. Menyoroti poin terakhir, di awal pemerintahan Park, hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara sedang dalam kondisi yang buruk. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tensi antara kedua negara seiring dengan *transfer power* yang terjadi dari Kim Jong Il ke Kim Jong Un, yang memperlihatkan

² The Famous People, "Park Geun-hye Biography." Diakses melalui www.thefamouspeople.com pada 8 September 2017.

tindakan agresifnya sebagai bentuk pemantapan *powernya* di Pyongyang.

Sebelum kebijakan *Trust Politic* Park Geun-hye, untuk mengatasi masalah kemanusiaan, ekonomi dan krisis keamanan dengan Korea Utara pemerintahan sebelum Park telah mengadopsi berbagai pendekatan. Dua yang paling menonjol adalah *Sunshine Policy* dan *Hard Line Policy*. Kebijakan *Trust Politic* ini merupakan sintesa dari *Sunshine Policy* Kim Dae Jung dan kebijakan garis keras Lee Myung Bak. Yang bertujuan untuk menyajikan sebuah postur kebijakan yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut. Ada juga yang menyebutnya sebagai *grand strategi* di pemerintahan Park Geun-hye, strategi ini terdiri dari tiga pilar utama yakni pertahanan yang kuat (*deterrence*), diplomasi kepercayaan (*trust diplomacy*), dan proses membangun kepercayaan di Semenanjung Korea (*trust building*).³ *Trust-Politik Policy* adalah tentang bagaimana membangun kepercayaan sebagai cara untuk mempromosikan kerja sama dan kolaborasi institusional pada level yang lebih tinggi.

Kebijakan *Trust Politic* sangat mengedepankan konsep "trust" dalam setiap proses yang akan dijalankan. *Trust* menurut Park sebagai sebuah inti nilai terhadap keseluruhan filosofi politik yang menjadi aset yang dibutuhkan dalam membantu pengembangan kerja sama tidak hanya

³ Cheon Seongwhun, "Trust- The Underlying Philosophy Of The Park Geun-Hye Administration," Center For Strategic And International Studies (Mei 2013): 1, diakses melalui www.Csis.org pada 16 Oktober 2017.

antar individu tapi juga antar bangsa.⁴ Perdamaian tanpa konsep *trust* merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena kesungguhan dalam proses *trust* membutuhkan waktu dan pendekatan secara bertahap dan konsisten.⁵

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah "Mengapa Park Geun-hye menerapkan kebijakan *Trust Politic* dalam menghadapi Korea Utara pada tahun 2013-2016?"

Dibawah tingkat analisa perilaku individu, penulis akan menggunakan konsep **Kebijakan Luar Negeri dan Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) dari Richard C. Snyder** untuk menjelaskan penelitian ini.

Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah suatu proses. Proses yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Richard C. Snyder menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal setting yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.⁶ *Setting* didefinisikan sebagai seperangkat hal-hal ataupun kejadian yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang

⁴Sheen Seong-ho, "Dilemma of South Korea's Trust Diplomacy and Unification Policy," *International Journal of Korean Unification Studies* 23, no. 3 (2014): 104.

⁵ Ibid

⁶ Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin (eds), *Foreign Policy Decision Making : An Approach to the Study of International Politics* (New York: The Free Press, 1962): 203.

potensial yang mempunyai pengaruh pada tindakan suatu negara.

Asumsi dasar perspektif pengambilan keputusan Richard C. Snyder yaitu bahwa segala tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pelaku politik domestik, dimana para pemimpin negara (baik secara individu ataupun kelompok) bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan.⁷ Apabila ingin memahami suatu keputusan politik suatu negara harus melihat dari sudut pandang dan perspektif dari orang yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan tersebut.⁸

Richard C. Snyder menjelaskan bahwa *setting internal* dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peran kepemimpinan, persepsi, arus informasi yang didapat, dampak dari kebijakan luar negeri dan sistem kepercayaan para pembuat keputusan merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara. Teori Richard C. Snyder juga mem pertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya, apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis ataupun beresiko. Penelitian ini menggunakan perspektif behavioralis karena

⁷ Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy* (New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982): 7.

⁸Snyder dalam SP Varma, *Teori politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010): 392.

perspektif ini mempercayai bahwa melalui teknik mempelajari perilaku manusia akan lebih menunjukkan hasil pasti dari hal yang diamati. Sebagai kaitan dengan proses pembuatan kebijakan, perspektif behavioralis lebih menyarankan metode penganalisaan terhadap sikap atau perilaku pemimpin negara dalam menjalankan negara, daripada negaranya atau kebijakannya tersebut. Negara bukan titik sentral dalam pembahasan behavioralis tetapi perilaku aktor negara, tidak hanya perseorangan, tetapi termasuk organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan masyarakat, atau masyarakat politik.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan/ dokumen-dokumen dari situs resmi oleh Pemerintah Korea Selatan. Sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs,dll

Pembahasan

Park Geun-hye menerapkan kebijakan *Trust Politic* terhadap Korea Utara pada tahun 2013-2016 karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, yang pertama yaitu **persepsi Park yang progresif dan idealis terhadap korea utara**, Dalam kasus Park Geun-hye, perspektifnya terhadap Korea Utara sudah mulai dibangun sejak Park Geun-hye kecil. Sejak kecil Park Geun-hye sudah didikte bahwa Korea

Utara adalah negara yang kejam, suka berperang, dan susah diajak berkompromi. Selama bertahun-tahun, Park melihat ayahnya Park Chung Hye berusaha untuk memperbaiki perekonomian Korea Selatan yang rusak parah akibat Perang Korea. Pada 15 Agustus 1974, tepat di hari kemerdekaan Korea Selatan, Park bahkan kehilangan ibunya dalam sebuah tragedi pembunuhan dibawah perintah rezim Korea Utara. Tidak berhenti sampai disitu, pada saat Park menggantikan ibunya sebagai *First Lady*, Park dihadapkan pada realita bahwa perang antar negara hanya menyisakan anak-anak dan perempuan sebagai korban, banyak keluarga yang terpisah dan menimbulkan kerugian yang massif bagi perekonomian negara.

Bukti perspektif Park Geun-hye yang progresif dan idealis terhadap Korea Utara ditandai dengan adanya itikad serius dari Park Geun-hye untuk menciptakan perdamaian dengan Korea Utara melalui kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Setelah berusaha mewujudkan perdamaian di Semenanjung selama kurang lebih 37 tahun, Park menyimpulkan bahwa kurangnya kepercayaan telah lama menggerogoti upaya rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Kedua, kegagalan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara sebelum masa Park Geun-hye, Seperti yang di tulisnya dalam sebuah artikel di *Foreign Affairs*, salah satu tujuan utama Park Geun-hye selama kampanye pemilu adalah untuk membedakan pendekatannya kepada Korea Utara dengan kebijakan yang pernah diadopsi oleh pemerintah

Korea Selatan sebelumnya, baik pendekatan progresif maupun pendekatan konservatif. Dua kebijakan yang di jadikan tolak ukur adalah *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Kim Dae Jung yang kemudian dilanjutkan Roh Moo Hyun dan kebijakan Isolasi Lee Myung Bak.

Dari dua kebijakan ini, Park menyimpulkan terdapat beberapa kegagalan yang perlu dijadikan catatan dalam membuat kebijakan selanjutnya. Pertama, pendekatan intens dengan Pyongyang melalui bantuan kemanusiaan berskala besar, bantuan ekonomi, dan dialog tanpa syarat dalam upaya untuk membujuk rezim Korea Utara agar mematuhi aturan dan norma internasional tidak menghasilkan hasil yang terlalu memuaskan. Pemberian bantuan secara terus menerus namun tanpa syarat yang jelas hanya terlalu menguntungkan Pyongyang yang terus bias melakukan pembangunan nuklirnya dengan leluasa. Dengan pendapat ini, efektifitas kebijakan yang terlalu konservatif terhadap actor yang suka berperang seperti Pyongyang dipertanyakan. Kedua, kebijakan yang berusaha untuk hanya menerapkan tekanan pada Korea Utara juga gagal karena opsi militer nyatanya terbatas pada perang dan damai sementara pemberian sanksi gagal menempatkan tekanan yang signifikan pada masyarakat Korea Utara dan ekonominya karena tetap mendapatkan bantuan dari Cina.

Belajar dari kesalahan dua kebijakan sebelumnya, kebijakan baru diperlukan, sebuah kebijakan penyalarsan, yang harus ditopang oleh konsensus publik dan harus tetap konstan dalam menghadapi transisi

politik dan kejadian domestik atau internasional yang tak terduga yakni *Trust Politic*. Kebijakan semacam itu tidak berarti mengadopsi pendekatan jalan tengah, namun kebijakan ini akan melibatkan penyesuaian keamanan Korea Selatan dan kerja sama ekonomi dengan pengupayaan dialog antar-Korea dengan tetap melakukan upaya-upaya internasional yang paralel.

Faktor Eksternal, pertama respon terhadap eskalasi ancaman Korea Utara, Park secara resmi menjalankan pemerintahan di awal tahun 2013 ketika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sedang mengalami peningkatan ketegangan. Peningkatan ketegangan tersebut merupakan hasil dari hubungan dengan Korea Utara yang sudah tegang selama masa presidensi pendahulu Park, Lee Myung-bak.

Merespon eskalasi tersebut, Park Geun-hye meluncurkan kebijakan *Trust Politic* yang kurang bersifat ideologis namun lebih pragmatis dan bertujuan menghindari eskalasi lebih lanjut dan kemungkinan pemerasan oleh pemerintah Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan yang baru menjelaskannya pada saat itu bahwa Seoul akan segera bereaksi terhadap provokasi lebih lanjut dari Utara tetapi tetap terbuka untuk dialog

Selanjutnya Park dapat menerapkan kebijakan *Trust Politic* pada tahun 2013-2016 terhadap Korea Utara karena mendapat dukungan dari masyarakat internasional terutama Amerika Serikat dan Cina. Pendapat Amerika Serikat sangat penting bagi Seoul karena Amerika Serikat merupakan aliansi militer utamanya sementara Cina adalah partner

ekonomi utama Korea Selatan. Garis politik Presiden Park *vis-à-vis* Korea Utara telah secara terbuka didukung oleh Presiden Obama yang menyatakan bahwa '*Trust Politic*' yang dilakukan oleh sekutunya di Asia '*very compatible with my approach*'.

Berkenaan dengan Korea Utara, baik pemerintah China dan Korea Selatan takut akan runtuhnya rezim Korea Utara secara tiba-tiba, yang mungkin membanjiri negara mereka dengan pengungsi. Oleh karena itu, Seoul dan Beijing menemukan diri mereka sebagai sekutu yang pragmatis meskipun terdapat perbedaan yang mendasar. Kedua negara tidak setuju pada legitimasi partisi Utara-Selatan, dan hubungan baik yang terjalin telah dirusak oleh penolakan Beijing untuk mengutuk Korea Utara atas insiden Cheonan dan Yeonpyeong.

Penerapan *Trust-Building Process On The Korean Peninsula* Pada Tahun 2013-2016

Trust-Building Process On The Korean Peninsula adalah bentuk nyata penerapan *Trust Politic* terhadap Korea Utara pada masa Park Geun-hye untuk memperbaiki hubungan antar dua Korea. *Building Trust* yang dimaksud adalah berdasarkan postur keamanan yang kuat, bertujuan menciptakan perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea dan menciptakan dasar bagi unifikasi damai kedepannya.

Administrasi Park Geun-hye telah merespon secara tegas dengan prinsip *Building Trust* yang sudah disebutkan terhadap provokasi dan ancaman dari Korea Utara. Korea Utara telah meningkatkan tensi di Semenanjung Korea dengan meluncurkan *long-range missiles* pada

12 Desember 2012, melakukan tes nuklir ketiga pada 12 Februari 2013 dan mengancam akan membatalkan perjanjian gencatan senjata tahun 1953 pada 5 Maret 2013, membatalkan perjanjian non-agresi pada 8 Maret 2013, dan mendeklarasikan perang dengan Korea Selatan pada 30 Maret. Dalam merespon perilaku Korea Utara tersebut, pemerintah Korea Selatan mengklarifikasi prinsipnya bahwa Korea Utara tidak akan mendapatkan apapun dari provokasi dan ancaman yang dibuatnya, sembari mendesak Utara untuk membangun kepercayaan melalui mengikuti norma internasional dan menghormati perjanjian antar keduanya.

Ditahun-tahun setelahnya, pemerintah Korea Selatan tetap konsisten untuk menerapkan prinsipnya. Contohnya, pada 2015, telah tercapai kesepakatan upah minimal di KIC dan kesimpulan kesepakatan pada 25 Agustus 2013. Di waktu yang sama, pemerintah Korea Selatan tetap melanjutkan untuk membuat kemajuan internal dalam persiapan untuk unifikasi dengan memperluas konsensus sosial untuk unifikasi melalui kerjasama dengan *President Committee for Unification Preparation (PCUP)*. Melalui kerjasama yang terbentuk pada Juli 2014 ini, pemerintah telah menciptakan sinergi melalui menciptakan kebijakan yang spesifik berdasarkan ide yang diajukan oleh sektor privat dan penelitian bersama terhadap unifikasi dan membuat itu diketahui oleh orang banyak.

Pemerintah juga mengadakan berbagai acara budaya seperti *Unification Expo 2015*, *UniKorea Culture Week 2015* dan *Piano of*

Unification Project yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertarik dengan isu yang penting ini. Berkat acara ini, ketertarikan masyarakat Korea tentang unifikasi meningkat. Di sebuah situs jajak pendapat 4Q pada 2015 menunjukkan bahwa 85% responden setuju dengan pentingnya mempersiapkan unifikasi.

Pemerintah Korea Selatan juga melakukan usaha serius, untuk memperluas dukungan internasional terhadap unifikasi di Semenanjung Korea dan meletakkan dasar unifikasi melalui kerjasama dengan komunitas internasional. Korea Selatan telah melakukan pertemuan *Korea-Germany Joint Consultation Committee on National Unification* dan menerbitkan *German Unification Series* dengan tujuan menganalisis dan bertukar pengalaman dari unifikasi Jerman. Pemerintah juga mengadakan *Korea Global Forum* dan *the International Unification Strategy Dialogues* dengan partisipan dari banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Cina

Penutup

Dalam periode 2013-2016, administrasi Park telah berusaha keras dan menyalahkan provokasi Korea Utara sebagai penghalang pembentukan kepercayaan antara keduanya. Namun, dalam hal mempertahankan kebijakan garis keras melalui *deterrence* yang kuat dan pemberian sanksi, Seoul lebih memilih mengambil posisi menekan daripada menyerang, yang sekaligus menunjukkan sedikit perubahan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, dan sedikit kemajuan menuju perubahan yang lebih konstruktif dari paradigma *trust politic*. Kedua belah

pihak telah terlibat dalam serangkaian manuver “tit-for-tat” yang mencerminkan pembalasan, deterrence, dan pemaksaan daripada timbal balik dan kepercayaan. Penerapan *trust politic* selama tiga setengah tahun pertama telah memperlihatkan tidak adanya inisiatif nyata yang konstruktif, sayangnya, *trust politic* seperti yang awalnya diungkapkan oleh Park Geun-hye, belum diaktualisasikan, dan tampaknya semakin tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan konsep seperti itu oleh pemerintahannya.

Daftar Pustaka

Buku

Jensen, Lloyd. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1982.

Kydd, Andrew H. *Trust and Mistrust in International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 2005.

Mas’oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Nam, Kim Choong. *The Korean Presidents: Leadership for Nation Building*. USA: EastBridge, 2007.

Snyder, Richard C, H.W. Bruck, dan Burton Sapin. *Foreign Policy Decision Making : An Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press, 1962.

Jurnal

Byung-se, Yun. “*Park Geun-hye’s Trustpolitik: A New Framework for South Korea’s Foreign Policy*,” *Global Asia* 8, no. 3 (2013).

Fiori, Antonio. “*Whither the Inter-Korean Dialogue? Assessing Seoul’s Trustpolitik and its Future Prospects*.” Working Papers of Instituto Affari Internazionali 17, ISSN 2280-4331 (2017).

Hoffman, Aaron M. “*A Conceptualization of Trust in International Relations*.” *European Journal of International Relations* 8, no.2 (2002).

Howe, Brendan. “*Beyond Security towards Peace on the Korean Peninsula: Strategies for Transforming A Nuclear Conflict*.” *The Korean Journal of Security Affairs* 17 no. 1 (2012).

Jin-Ha, Kim. “*Rethinking the Sunshine Promise: Structural Impediments to South Korea’s Positive Inducement Policies for the North Korean Problem*.” *The Korean Journal of Defense Analysis* 28 no. 3 (2016).

Website

Byung-se, Yun. “*Park Geun-hye’s Trustpolitik: A New Framework for South Korea’s Foreign Policy*.” Ministry of Foreign Affairs (29 September 2013).

- <http://mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp?typeID=12&boardid=14135&seqno=312859>(diakses pada 19 September 2016).
- Cheon, Seongwhun. *Trust -the underlying philosophy of the park geun-hye administration*. Center for strategic and international studies (6 Mei 2013). www.Csis.org (diakses pada 15 Juli 2018).
- Geun-hye, Park. "A New Kind of Korea: Building Trust between Seoul and Pyongyang," *Foreign Affairs* (1 September 2011). <https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2011-09-01/new-kind-korea> (diakses pada 19 September 2016).
- Dokumen**
- Lee Y-I. *From first daughter to first lady to first woman president: Park Geun-hye's path to the South Korean presidency*. Feminist Media Studies: 2016.
- M, Lim, Ahn C, dan Kim K. *Baggeunhyee Daehan Bodopeuleim Bunseog [A study of the news frame in newspapers: Frame analysis of Park Geun-hye*. Seoul: Chosun Ilbo dan Hankyoreh, 2015.
- Ministry of Unification. *2014 White Paper on Korean Unification* (Seoul: Ministry of Unification, 2014)
- Ministry of Unification. *2016 White Paper on Korean Unification* (Seoul: Ministry of Unification, 2016)
- Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Parliament. *2014 In Depth Analysis In The Republic of Korea Park Geun-hyes Presidency Records a Strong Start, Despite Domestic Hurdles*. Brussels: European Parliament, 2014.
- South Korean Ministry of Foreign Policy. *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative*. Seoul: South Korean Ministry of Foreign Policy, 2013.